

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

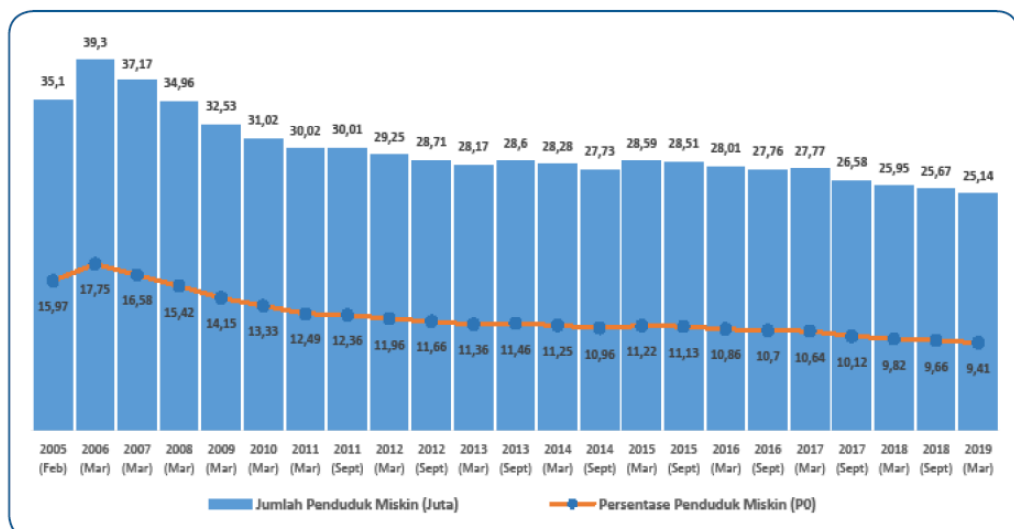
Kemiskinan ada dari zaman dahulu hingga saat ini dan merupakan masalah yang rumit dan tidak terelakan. Kemiskinan ini merupakan kondisi dimana terjadinya ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang dialami oleh masyarakat. Menurut Supriatna kemiskinan bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang serba terbatas, dalam hal ini bukan atas kemauan orang yang tersebut.² Pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan berada dalam keadaan miskin, dimana mereka berada dalam keadaan serba kekurangan. Masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan utamanya dalam segi material. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat mencukupi asupan gizinya, kesulitan dalam mengakses pendidikan maupun kesehatan, kekurangan modal kerja, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dampak lain yang muncul dari masalah kemiskinan rendahnya tingkat moralitas masyarakat, rendahnya harga diri dan bahkan bisa menyebabkan kurangnya kesadaran agama.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki kompleksitas dan juga bersifat multidimensional atau berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya. Dari segi penduduk, kemiskinan dapat dilihat dari

² Tjahya Supriatna, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, (Bandung: Humaniora Utama, 1997), hlm. 90.

minimnya produktivitas kerja, penghasilan masyarakat, kesehatan, tingkat pendidikan dan kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan tidak bisa dipandang sebelah mata karena tingkat kemiskinan di suatu negara berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakatnya. Yang artinya jika tingkat kemiskinan tinggi maka laju pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat di suatu negara akan rendah. Kemiskinan yang tidak kunjung terselesaikan akan menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara. Dampak yang ditimbulkan seperti meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya kualitas pendidikan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan, tingkat pengangguran yang kian melonjak serta meningkatkan angka kematian dalam suatu negara. Hal ini sangat jelas menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu negara.

Gambar 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, 2005-Maret 2019



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode 2005-Maret 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah

maupun presentase. Namun pada Maret 2006, September 2013, dan Maret 2015 terjadi peningkatan jumlah dan presentase tingkat kemiskinan. Kenaikan ini terjadi akibat adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang merupakan akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.³ Pada tahun 2019, presentase penduduk miskin di Indonesia paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,41% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 25,14 Juta jiwa.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu menjadi fokus utama pemerintah untuk ditindak lanjuti sehingga membuatnya menjadi agenda rutin tahapan pembangunan di berbagai daerah. Semua daerah berupaya maksimal untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan maupun pengangguran agar kerentanan kemiskinan tidak dialami oleh seluruh masyarakat. Yang dimaksud dengan kerentanan kemiskinan adalah suatu kemungkinan individu atau rumah tangga untuk terjerumus ke dalam tingkat kemiskinan yang lebih parah lagi di masa mendatang.⁴ Adapun upaya yang ditempuh pemerintah yakni dengan adanya program penanggulangan kerentanan kemiskinan. Program penanggulangan kerentanan kemiskinan ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

³ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019*, 15 Juli 2019, hlm. 2.

⁴ Chusnul Rohmawati, *Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Melalui Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hlm. 2.

Penanggulangan kerentanan kemiskinan membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan berbagai komponen permasalahan serta diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Dalam bidang pendidikan, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Sementara dalam bidang ekonomi kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi, dan kurangnya keterampilan masyarakat juga bisa dianggap sebagai alasan terjadinya kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Faktor penyebab yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas menjadikan kebijakan penanggulangan kemiskinan harus bersifat permanen dan berkelanjutan bukan hanya bersifat temporer.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yakni Program Jalin Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) yang diluncurkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur pada periode kepemimpinan Gubernur 2014-2019. Program ini juga dirancang dengan 3 kegiatan utama, yaitu Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) dengan fokus utama masyarakat yang sangat miskin, Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan fokus utama masyarakat miskin dengan keadaan janda, serta Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan fokus utama masyarakat rentan miskin yang memiliki/berpotensi

memiliki usaha.⁵ Namun pada masa kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa 2020-2024, Program Jalin matra ini tidak lagi direalisasikan dan diganti dengan Program JATIM PUSPA (Pemberdayaan Usaha Perempuan) dengan memprioritaskan pada 15 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Gambar 1.2 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2019.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (P0)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Kabupaten						
Pacitan	85,26	78,64	75,86	15,42	14,19	13,67
Ponorogo	99,03	90,22	83,97	11,39	10,36	9,64
Trenggalek	89,77	83,5	76,44	12,96	12,02	10,98
Tulungagung	82,80	75,23	70,01	8,04	7,27	6,74
Blitar	112,93	112,4	103,75	9,80	9,72	8,94
Kediri	191,08	177,2	163,95	12,25	11,31	10,42
Malang	283,96	268,49	246,6	11,04	10,37	9,47
Lumajang	112,65	103,69	98,88	10,87	9,98	9,49
Jember	266,90	243,42	226,57	11,00	9,98	9,25
Banyuwangi	138,54	125,5	121,37	8,64	7,80	7,52
Bondowoso	111,66	110,98	103,33	14,54	14,39	13,33
Situbondo	88,23	80,27	76,44	13,05	11,82	11,2
Probolinggo	236,72	217,06	207,22	20,52	18,71	17,76
Pasuruan	165,64	152,48	141,09	10,34	9,45	8,68
Sidoarjo	135,42	125,75	119,29	6,23	5,69	5,32
Mojokerto	111,79	111,55	108,81	10,19	10,08	9,75
Jombang	131,16	120,19	116,44	10,48	9,56	9,22
Nganjuk	125,52	127,28	118,51	11,98	12,11	11,24
Madiun	83,43	77,75	71,91	12,28	11,42	10,54
Magetan	65,87	64,86	60,43	10,48	10,31	9,61
Ngawi	123,76	123,09	119,43	14,91	14,83	14,39
Bojonegoro	178,25	163,94	154,64	14,34	13,16	12,38
Tuban	196,10	178,64	170,8	16,87	15,31	14,58
Lamongan	171,38	164	157,11	14,42	13,80	13,21
Gresik	164,08	154,02	148,61	12,80	11,89	11,35
Bangkalan	206,53	191,33	186,11	21,32	19,59	18,9
Sampang	225,13	204,82	202,21	23,56	21,21	20,71
Pamekasan	137,77	125,76	122,43	16,00	14,47	13,95
Sumenep	211,92	218,6	211,98	19,62	20,16	19,48
Kota						
Kediri	24,07	21,9	20,54	8,49	7,68	7,16
Blitar	11,22	10,47	10,1	8,03	7,44	7,13
Malang	35,89	35,49	35,39	4,17	4,10	4,07
Probolinggo	18,23	16,9	16,37	7,84	7,20	6,91
Pasuruan	14,85	13,45	12,92	7,53	6,77	6,46
Mojokerto	7,28	7,04	6,63	5,73	5,50	5,15
Madiun	8,70	7,92	7,69	4,94	4,49	4,35
Surabaya	154,71	140,81	130,55	5,39	4,88	4,51
Batu	8,77	7,98	7,89	4,31	3,89	3,81
Jawa Timur	4					
	617,01	4332,59	4112,25	11,77	10,98	10,37

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, BPS Provinsi Jawa Timur

⁵ Buku Pedoman Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Tahun 2019, hlm. 6.

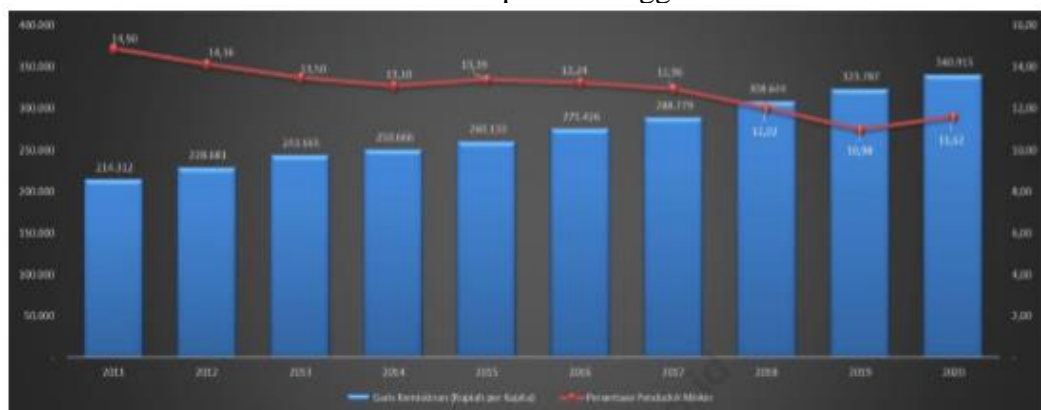
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan diprovinsi Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) mengalami penurunan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebanyak 4.617.010 jiwa, lalu pada tahun 2018 jumlahnya menurun menjadi 4.332.590 jiwa, dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 4.112.250 jiwa. Sehingga, jika jumlah penduduk miskin ini dinyatakan dalam persentase maka pada tahun 2017 sebesar 11,77%, tahun 2018 sebesar 10,89%, dan pada tahun 2019 sebesar 10,37%.⁶ Dari jumlah presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, bisa diketahui jika pada 2018 jumlahnya menurun sebesar 0,79% dan pada tahun selanjutnya atau tahun 2019 presentasinya turun kembali sebesar 0,61%. Meskipun mengalami penurunan, angka kemiskinan ini masih tergolong cukup tinggi.

Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah mencapai 1.205,22 km² yang dihuni oleh ±701.000 jiwa. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek berkisar antara 10-13% selama tiga tahun terakhir (2017 – 2019). Karena itulah Kabupaten Trenggalek termasuk salah satu dari beberapa kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang mendapatkan bantuan dari program Jalin Matra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi. Setelah program Jalin Matra PK2 dari Pemerintah Provinsi tidak lagi direalisasikan, dalam mengatasi masalah kemiskinan yang lumayan besar Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan program penganggulangan kemiskinan. Ada tiga program yang

⁶ Badan Pusat Statistik, *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2019*, Bersumber pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS Provinsi Jawa Timur.

diselenggarakan, yang pertama program pengurangan beban pengeluaran seperti pemberian kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Rastha (Beras Sejahtera). Yang kedua yakni program pemberdayaan masyarakat miskin seperti e-Warung, Kelompok Usaha Bersama PKH (KUBE PKH), Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra), dan juga Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL). Dan yang ketiga yaitu Penggabungan program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani masalah gizi buruk maupun stunting, penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), serta program lainnya.⁷

Gambar 1.3 Tren Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2020



Sumber: Susenas 2010-2019, diolah

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 sebanyak 81,06 ribu jiwa atau sekitar 11,62 persen dari total penduduk. Dibandingkan kondisi 2019, terjadi kenaikan sebesar 0,64 persen poin. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 sebesar 1,48 naik dibandingkan tahun

⁷ Momentum, *PEMKAB Trenggalek Bersinergi Entaskan Kemiskinan*, 6 April 2018 (<https://momentum.com>) Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 10.46 WIB.

2019 yang sebesar 1,37. Begitu juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang juga mengalami kenaikan dari 0,31 ditahun 2020 menjadi 0,30 di tahun 2019. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di antara mereka juga semakin lebar. BPS melaporkan, Garis Kemiskinan (GK) sebagai cutting off penduduk miskin dan tidak miskin di Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebesar Rp. 340.915 perkapita/per bulan, meningkat 5,29 persen atau Rp 17.128 perkapita/per bulan dibanding tahun 2019.⁸

Berdasarkan RPJMD 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Trenggalek meluncurkan Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagai fasilitator dari program ini. Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) merupakan salah satu program penanggulangan pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan tekad pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengurangi tingkat pengangguran serta mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) berupa pembangunan usaha perdagangan yang berbasis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam kegiatan penyediaan kebutuhan dasar pangan bagi masyarakat pedesaan. Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) ini memiliki sasaran utama yakni kelompok masyarakat yang masuk ke dalam golongan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Trenggalek 2020, Desember 2020, hlm. 71-72. (<https://trenggalekkab.bps.go.id>) diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 14.00 WIB.

tergolong pada desil 1 dan 2. Kelompok RTSM yakni rumah tangga yang dikategorikan tidak berdaya, rentan dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengantisipasi tekanan-tekanan yang melanda. Sedangkan kelompok masyarakat yang tergolong pada desil 1 dan 2 adalah rumah tangga yang relatif cukup mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun apabila terdapat kebutuhan mendesak lainnya mengalami kesulitan dalam memenuhinya.⁹

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menyerahkan otoritas secara penuh kepada desa dalam mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam mengatasi permasalahan tentang kerentanan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat desa maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa memerlukan bantuan keuangan khusus yang berorientasi pada kegiatan pembangunan berkelanjutan dengan partisipasi masyarakat desa di dalamnya. Bantuan keuangan khusus selain ditujukan untuk memperbaiki perekonomian desa juga bisa menjadi salah satu sarana untuk menciptakan peluang usaha bagi masyarakat desa. Pemerintah Desa memberikan dukungan modal terhadap pelaku usaha kecil untuk lebih mengembangkan usahanya. Sinergis pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan kegiatan perekonomian yang ada di desa akan menciptakan daya tahan ekonomi yang kuat.

⁹ Buku Pedoman Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Tahun 2019, hlm. 7.

Penerima Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek yakni beberapa desa yang masyarakatnya masih tergolong ekonomi rendah. Salah satunya yakni Desa Sukokidul yang terletak di Kecamatan Pule. Alasan saya melakukan penelitian di Desa Sukokidul adalah karena Desa Sukokidul termasuk salah satu penerima program Jalin Matra Mandiri KEPEL. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinannya masih tergolong tinggi. Program Jalin Matra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ini berbasis kegiatan usaha bersama dan membidik rumah tangga miskin yang memiliki potensi usaha. Sehingga menurut saya perlu diteliti lebih dalam terkait potensi-potensi usaha yang bisa dikembangkan oleh masyarakat sebagai salah satu upaya memberdayakan perekonomian khususnya masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin mengingat program ini berbasis kegiatan usaha bersama.

Desa Sukokidul berada di wilayah pegunungan yang berbukit-bukit dengan luas wilayah 917,025 Ha terbagi menjadi empat dusun yaitu Dusun Sukorejo, Dusun Krajan, Dusun Genting dan Dusun Jompong. Dengan batas-batas wilayah sebelah utara adalah Desa Nglingsis Kecamatan Tugu, sebelah timur Desa Jombok Kecamatan Pule, sebelah selatan Desa Karanganyar Kecamatan Pule, dan sebelah barat Desa Tumpuk Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo. Jumlah penduduk Desa Sukokidul sebanyak 3.210 jiwa per Juli 2020. Akibat dari wilayah yang berbukit-bukit, mayoritas penduduk Desa Sukokidul bekerja dalam bidang pertanian. Sedangkan sisanya ada yang

bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang, pengrajin, peternak, karyawan swasta, PNS dan lain sebagainya. Perekonomian Desa Sukokidul masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang miskin. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat ±571 KK di Desa Sukokidul yang masuk dalam golongan rumah tangga miskin.¹⁰ Jumlah KK tersebut merupakan sasaran/penerima bantuan baik dari program Jalin Matra Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), Perluasan Bantuan Sosial Pangan (BSP), Program Kartu Penunjang Ekonomi (KPE), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai COVID-19, maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan potensi ekonomi guna meningkatkan produktifitas masyarakat. Adapun tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdapat di Desa Sukokidul belum maksimal karena kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung kegiatan tersebut. Banyaknya lembaga pemberdayaan yang dimiliki Desa Sukokidul, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) maupun lembaga-lembaga lainnya masih kurang berfungsi secara optimal hingga saat ini.

¹⁰ Kementerian Sosial Indonesia, “Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS N.G) Desa Sukokidul Tahun 2019” (<https://siks.kemensos.go.id>) diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 11.43 WIB

Dalam pelaksanaan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) dilakukan dari aspek permodalan, dan kemitraan usaha. Permasalahan yang paling mendasar dari sebuah usaha yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia dan juga minimnya sumber pendanaan yang digunakan. Modal merupakan unsur yang penting dalam usaha meskipun bukan yang terpenting karena banyak sedikitnya modal yang tersedia menentukan keberlangsungan suatu usaha. Modal yang sedikit menyebabkan usaha sulit berkembang. Akan tetapi, modal usaha yang banyak juga tidak menjamin kesuksesan dalam suatu usaha. Karena sumber daya pengelola juga merupakan faktor penentu keberhasilan dalam suatu usaha. Karena kesuksesan dari suatu usaha dapat dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam hal pengelolaan usaha. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui Program Jalin Matra Mandiri, masyarakat miskin diberi bantuan modal untuk menjalankan usaha bersama. Di sisi lain dalam pelaksanaan program ini terdapat kegiatan pendampingan dimana dalam kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pelaksanaan program Jalin Matra Mandiri juga terdapat upaya-upaya penguatan kelembagaan agar tercipta kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Jalin Matra Mandiri dilakukan dari aspek permodalan, pendampingan dan penguatan kelembagaan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa sehingga masyarakat mampu mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Dari

penjelasan yang dijabarkan di atas, peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan program Jalin Matra Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sukokidul dengan judul penelitian “Strategi Pengembangan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Mandiri dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Penelitian Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) di Desa Sukokidul Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dapat diungkap sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengembangan program Jalin Matra Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada aspek permodalan?
2. Bagaimana strategi pengembangan program Jalin Matra Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada aspek pendampingan?
3. Bagaimana strategi pengembangan program Jalin Matra Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada aspek penguatan kelembagaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan program Jalin Matra Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada aspek permodalan.

2. Untuk mengetahui strategi pengembangan program Jalin Matra Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada aspek pendampingan.
3. Untuk mengetahui strategi pengembangan program Jalin Matra Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada aspek penguatan kelembagaan.

D. Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian yang lebih terarah dan memudahkan dalam mencapai tujuan dari suatu penelitian, maka Batasan penelitian ini lebih difokuskan pada informasi seputar strategi pengembangan program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam hal permodalan, kegiatan pelatihan dan juga penguatan kelembagaan pada studi penelitian Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) di Desa Sukokidul Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijabarkan di atas, diharapkan bisa menghadirkan manfaat yang baik dalam bidang teoritis hingga praktis. Penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ide, gagasan, maupun pemikiran guna

meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ekonomi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan edukasi serta dapat menjadi bahan informasi bagi civitas akademika IAIN Tulungagung maupun institusi lainnya terkait dengan kondisi lapangan dimana Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) ini diterapkan di wilayahnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai strategi pengembangan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana di perguruan tinggi IAIN Tulungagung.
- b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian terkait program ini bisa menjadi bahan evaluasi serta masukan terkait strategi pengembangan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
- c. Bagi masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan berpikir kita mengenai bagaimana strategi pengembangan

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama dalam program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) di wilayahnya.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi secara Konseptual

Supaya mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan untuk menghindari kesalahfahaman dari judul dan istilah-istilah di atas, oleh karenanya perlu dijabarkan beberapa kosakata yang ada dalam proposal penelitian ini, diantaranya:

a. Strategi

Strategi berasal dari bahasa inggris yaitu *strategy* yang artinya ilmu siasat (perang) akal. Strategi adalah proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengawasan berbagai keputusan dan tindakan strategis dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif.¹¹ Rangkuti mengemukakan bahwa strategi merupakan perencanaan induk yang komprehensif yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.¹² Strategi juga dimaknai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini, strategi bisa diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

¹¹ Ismail Solihin, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 64.

¹² Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, OCAI*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 183.

b. Pengembangan

Pengembangan didefinisikan sebagai suatu upaya dalam peningkatan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan maupun pelatihan.¹³ Sebelum melakukan kegiatan pengembangan, terlebih dahulu melakukan analisis lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal guna menemukan metode pengembangan yang sesuai.

c. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah akar kata dari daya atau *power*. Secara etimologis pemberdayaan memiliki kata dasar “daya”, yang artinya kekuatan atau kemampuan, sehingga memiliki arti pemberian kekuatan kepada pihak yang tak berdaya.¹⁴ Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah segala aktivitas dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

d. Masyarakat Miskin

Kemiskinan merupakan suatu keadaan individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam hal ekonomi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Masyarakat dikatakan miskin jika memiliki pendapatan

¹³ Abdul Majid, *Percanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 24.

¹⁴ Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 77.

yang rendah dibandingkan dari rata-rata pendapatan sehingga ia tidak berkesempatan memenuhi standar hidup guna mensejahterakan dirinya.¹⁵

e. Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Mandiri

Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Trenggalek melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dengan kegiatan yang disebut dengan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL).¹⁶

f. Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)

Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) merupakan upaya yang dilakukan dengan membentuk kelompok usaha bersama dengan menumbuhkan kerjasama anggota dalam kelompok dan kerjasama antar kelompok lainnya, serta meningkatkan kemampuan kelompok dalam menjalankan usaha ekonomi, meningkatkan pengetahuan ketrampilan anggota kelompok masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat, melakukan pemupukan modal kelompok dan

¹⁵ Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, UPP. AMP YKPN, (Yogyakarta: Jarnasy, 2004)

¹⁶ Pemerintah Kabupaten Trenggalek, *Buku Pedoman Umum Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)* Tahun 2019, hlm. 1.

pemanfaatan lembaga keuangan dan lembaga ekonomi yang ada di desa.¹⁷

2. Definisi Secara Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan strategi pengembangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui Program Jalin Matra Mandiri KEPEL di Desa Sukokidul Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek adalah pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi khususnya masyarakat miskin di Desa Sukokidul melalui Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) baik dalam aspek permodalan, pendampingan maupun penguatan kelembagaan. Pelaksanaan dari program tersebut merupakan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat miskin atau sasaran penerima program.

G. Sitematika Penulisan Skripsi

Dalam mempermudah mengetahui sistematika dari isi skripsi. Oleh karena itu penyusunan skripsi ini terdiri atas tiga bagian utama:

1. Bagian awal terdapat halaman sampul depan, sampul dalam, lembar persetujuan, lembar pengesahan penguji, lembar motto, lembar persembahan kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, lampiran-lampiran, dan abstrak.
2. Bagian utama menyajikan enam bab pokok pembahasan yaitu:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini menyajikan beberapa unsur yaitu

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

Bab II : Landasan Teori. Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini menyajikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian. Bab ini menyajikan paparan data yang sesuai dengan pertanyaan pada rumusan masalah dan temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan. Bab ini menyajikan uraian tentang keterkaitan antara teori atau temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

Bab VI : Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian, serta lembar daftar riwayat hidup peneliti.